

LKJIP 2020

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)



INVESTASI



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan yang memberikan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Laporan ini juga disusun sebagai syarat evaluasi dan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada rencana strategis SKPD, selama tahun anggaran berjalan. Sehingga dapat dilihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700710 199203 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Perencanaan Strategis	23
2.2. Indikator Penetapan Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PNS	5
Tabel 1.2 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Tahun 2020.....	5
Tabel 1.3 Data PNS Menurut Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.4 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2020	6
Tabel 1.6 Daftar Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.7 Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2020.....	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2020	32
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	32
Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017-2020	33
Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	33
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2020	33
Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2020	44
Tabel 3.7 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2020	48
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020.....	49
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2020 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian yang merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor. Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Buleleng terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kondisi Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2020 berjumlah 98 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 32 orang, Honor Daerah 1 orang, dan Tenaga Kontrak 65 orang. Berikut adalah tabel terkait dengan sumber daya manusia baik PNS, Kontrak dan Honor Daeah yang ada di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

1) Data PNS

Tabel 1.1 Data PNS

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
6	Pengatur (II/c)	1	2	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
8	Penata Muda (III/a)	2	2	4
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	4	7
10	Penata (III/c)	4	2	6
11	Penata Tk. I (III/d)	2	2	4
12	Pembina (IV/a)	4	2	6
13	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		17	15	32

2) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah sampai dengan Tahun 2020

Tabel 1.2 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Tahun 2020

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		d
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	25	30	55
2	Tenaga Kontrak Sopir	3	-	3
3	Tenaga Kontrak <i>cleaning sevice</i>	2	1	3
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	5	-	5
TOTAL :		35	31	66

3) Data PNS menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

Tabel 1.3 Data PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	2	7	9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	3	1	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	2	3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	4	3	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	3	1	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2	2	4
Jumlah		16	16	32

- 4) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

Tabel 1.4 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	13	9	22
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	3	3	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	3	5	8
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	6	5	11
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	7	6	13
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	4	2	6
Jumlah		36	30	66

- 5) Data PNS Menurut Jenjang Pendidikan sampai dengan Tahun 2020

Tabel 1.5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2020

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	2	-	-	-	9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	2	1	1	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	3	-	-	-	-	3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	3	1	3	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	1	2	1	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	4	-	-	-	-	4
Jumlah		4	20	5	3	-	-	32

- 6) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.6 Daftar Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	3	2	15	1	1	22
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	4	1	1	-	-	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	2	1	5	-	-	8
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	2	1	8	-	-	11

5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	4	1	8	-	-	13
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	3	-	-	6
	Jumlah	0	18	6	40	1	1	66

7) Data PNS Menurut Golongan sampai dengan Tahun 2020

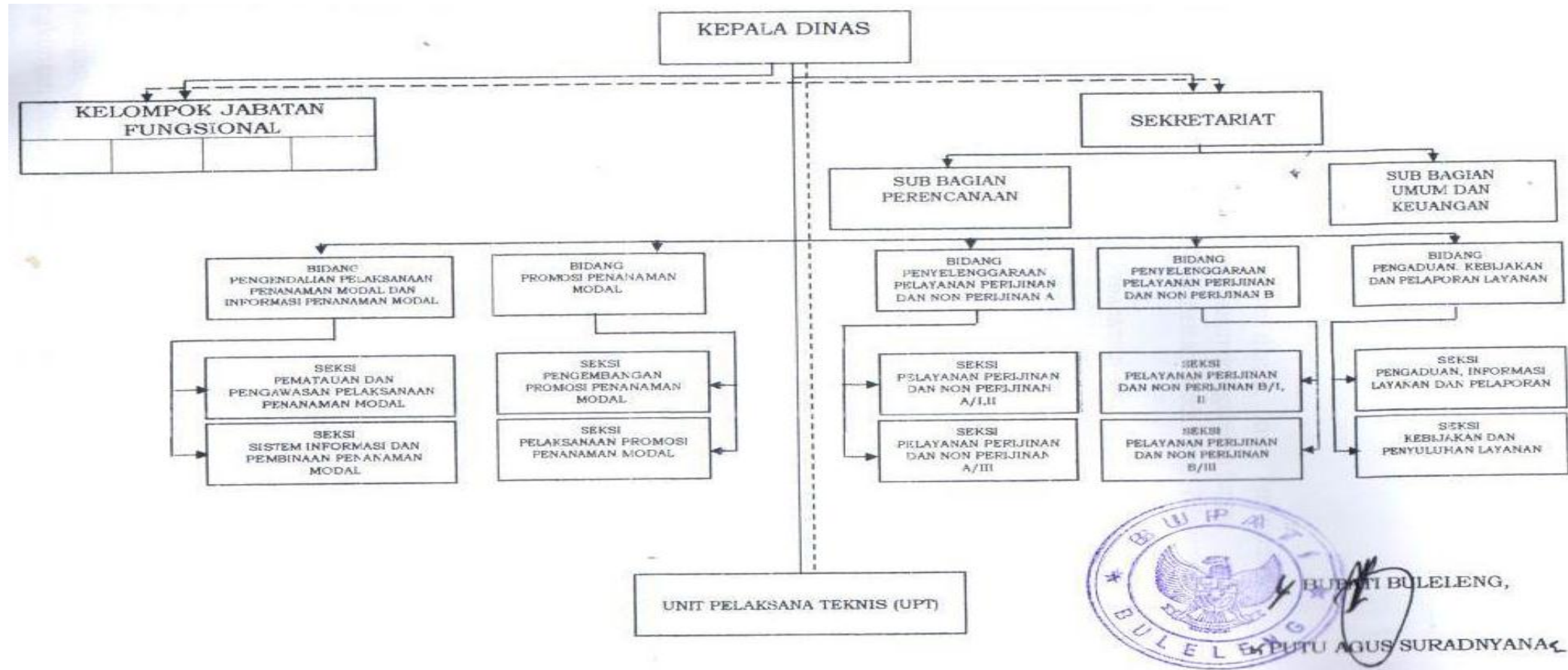
Tabel 2.7 Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2020

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan												Jml
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas									1				1
2	Sekretariat				1	3	2	1	1	1				9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi PM						1	2	1					4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal						1	1		1				3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A			3		1		2		1				7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B				1		2		1					4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan						1		1	2				4
	Jumlah			3	2	4	7	6	4	6				32

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada gambar berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIPE B

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

1.3.5. Kondisi Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomneklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Jumlah izin yang ditangani sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah 225 (dua ratus dua puluh lima) jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 17 (tujuhbelas) izin dikelola oleh Bidang A dan 208 (Dua ratus delapan) jenis perizinan dan non perizinan dikelola oleh Bidang B.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

Penanaman Modal

Non Perizinan

1. Surat Persetujuan Berusaha
2. Surat Rekomendasi

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perizinan

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)



5. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Non Perizinan

6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
7. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk : Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon/Selular, Reklame, Menara, Gardu atau bangunan lainnya, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (JPU)

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perizinan

8. Izin Lokasi (IL)
9. Izin Membuka Tanah Negara
10. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
11. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Non Perizinan

12. Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*)
13. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Ketenagakerjaan

Perizinan

14. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Perhubungan

Perizinan

15. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Ketahanan Pangan dan Perikanan

Perizinan

16. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perizinan

17. Izin Reklame

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Pendidikan

Perizinan

1. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pemerintah Kabupaten
2. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pemerintah Desa
3. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
4. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
5. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD)
6. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
7. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pemerintah Kabupaten
8. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pemerintah Desa
9. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten
10. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KB)
11. Izin Operasional Taman Penitipan Anak
12. Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)
13. Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
14. Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
15. Izin Operasional Kelompok Belajar
16. Izin Operasional Kelompok Belajar
17. Izin Operasional Majelis Taklim
18. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis

Kesehatan

Perizinan

19. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C
20. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D
21. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C
22. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D
23. Izin Mendirikan RS Pratama Tipe D
24. Izin Operasional RS Pratama Tipe D
25. Izin Mendirikan Puskesmas
26. Izin Operasional Puskesmas
27. Izin Apotek
28. Izin Toko Obat
29. Izin Toko Alat Kesehatan
30. Izin Optikal
31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
32. Izin Praktek Dokter Umum
33. Izin Praktek Dokter Spesialis
34. Izin Praktek Dokter Gigi
35. Izin Praktek Dokter Internsif

36. Izin Praktek Bidan
37. Izin Praktek Apoteker
38. Izin Praktek Perawat
39. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
40. Izin Praktek Fisioterapi
41. Izin Praktek Radiografer
42. Izin Kerja Refraksionis Optisien
43. Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan
44. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control)
45. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)
46. Izin Praktek Perawat Anastesi
47. Surat Izin Kerja Sanitarian
48. Izin Praktek Tenaga Gizi
49. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
50. Izin Praktek Rekam Medis
51. Izin Mendirikan Klinik
52. Izin Operasional Klinik
53. Izin Laboratorium
54. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional
55. Izin Salon
56. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)
57. Izin Psikologi Klinis
58. Izin Epidemiolog Kesehatan
59. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
60. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja
61. Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
62. Izin Biostatistik dan Kependudukan
63. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
64. Izin Entomolog Kesehatan
65. Izin Mikrobiolog Kesehatan
66. Izin Okupasi Terapis
67. Izin Akupuntur
68. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
69. Izin Teknik Kardiovaskular
70. Izin Teknis Pelayanan Darah
71. Izin Praktek Refraksionis Optisien
72. Izin Teknisi Gizi
73. Izin Audiologis

74. Izin Teknik Elektromedis
75. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik
76. Izin Fisikawan Medik
77. Izin Radioterapis
78. Izin Ortotik Prostetik
79. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
80. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
81. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Makan
82. Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel
83. Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan
84. Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
85. Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Non Perizinan

86. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
87. Izin Panti Sehat Berkelompok
88. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional
89. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (SPTP) SPA
90. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA)

Sosial

Perizinan

91. Izin Pengumpulan Sumbangan
92. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Non Perizinan

93. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Ketenagakerjaan

Perizinan

94. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
95. Perpanjangan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Lingkungan Hidup

Perizinan

96. Izin Lingkungan
97. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah

- 98. Izin Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
- 99. Izin Pemrosesan Akhir Sampah
- 100. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 101. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 102. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3
- 103. Izin Pembuangan Air Limbah

Non Perizinan

- 104. Surat Pernyataan Pengelolaan/Pengendalian Lingkungan Hidup (SPPL)

Perhubungan

Perizinan

- 105. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
- 106. Izin Trayek
- 107. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
- 108. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kebudayaan

Perizinan

- 109. Izin Melindungi Cagar Budaya
- 110. Izin Melindungi Koleksi Benda-benda Musium
- 111. Izin Perlinfungan Kebudayaan

Kearsipan

Perizinan

- 112. Izin Peminjaman Arsip Tertutup

Ketahanan Pangan dan Perikanan

Perizinan

- 113. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

Pariwisata

Non Perizinan

- 114. Pengelolaan Musium
- 115. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- 116. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
- 117. Pengelolaan Goa
- 118. Wisata Agro



119. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat
120. Pengelolaan Objek Sejarah
121. Kawasan Pariwisata
122. Angkutan Jalan Wisata
123. Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
124. Angkutan Laut Internasional Wisata
125. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
126. Agen Perjalanan Wisata
127. Biro Perjalanan Wisata
128. Restoran
129. Rumah Makan
130. Jasa Boga
131. Pusat Penjualan Makanan
132. Bar/Pub
133. Kafe
134. Hotel
135. Pondok Wisata
136. Bumi Perkemahan
137. Villa
138. Rumah Wisata
139. Apartmen Servis (Rumah Kos)
140. Jasa Manajemen Hotel
141. Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia
142. Sanggar Seni
143. Jasa Impresariat/Promotir
144. Galeri Seni
145. Gedung Pertunjukan Seni
146. Rumah Biliar
147. Lapangan Golf
148. Gelanggang Bowling
149. Gelanggang Renang
150. Lapangan Bola/Futsal
151. Lapangan Tenis
152. Wisata Olahraga Minat Khusus
153. Wisata Petualangan Alam
154. Taman Bertema
155. Taman Rekreasi
156. Kelab Malam

157. Diskotik
158. Karaoke
159. Arena Permainan
160. Panti/Rumah Pijat
161. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
162. Jasa Informasi Pariwisata
163. Jasa Konsultan Pariwisata
164. Jasa Pramuwisata
165. Wisata Arum Jeram
166. Wisata Selam
167. Wisata Dayung
168. Wisata Selancar
169. Wisata Olahraga Tirta
170. Wisata Memancing
171. Dermaga Wisata
172. SPA
173. Rumah Kos

Pertanian

Perizinan

174. Izin Usaha Perkebunan
175. Izin Usaha Tanaman Pangan
176. Izin Usaha Hortikultura
177. Izin Usaha Peternakan
178. Izin Usaha Obat Hewan
179. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
180. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan
181. Izin Usaha Pasar Hewan
182. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging

Non Perizinan

183. Pendaftaran Usaha Perkebunan
184. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
185. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
186. Pendaftaran Usaha Peternakan

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perizinan



187. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
188. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
189. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
190. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok
191. Izin Usaha Sarang Burung Walet
192. Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak
193. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
194. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
195. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
196. Izin Usaha Industri (IUI)
197. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
198. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
199. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
200. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
201. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
202. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
203. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Non Perizinan

204. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
205. Tanda Daftar Gudang (TDG)
206. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
207. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Kesatuan Bangsa dan Politik

Non Perizinan

208. Rekomendasi Penelitian

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin adalah sebagai berikut.

1. Pemohon mencari informasi pada Loker Informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi semua persyaratan dan mengajukan permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke *Front Office*;



3. Petugas *Front Office* menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas pengendali (Komputerisasi) mengecek apakah termasuk permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan selanjutnya membuat Kartu Kendali, Input Database Komputer, dan Menyerahkannya Ke petugas verifikasi di Bidang Perijinan A/B;
5. Petugas verifikasi menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak akan dikembalikan kepada *Front Office* untuk dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
6. Kepala seksi menjadwalkan pelaksanaan survei dan menugaskan kepada Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk beberapa ijin yang memerlukan survey lapangan.
7. Tim teknis melakukan pemeriksaan Lapangan dan menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan sesuai, akan menyerahkan hasil BAP kepada operator untuk menghitung besaran retribusi dan pencetakan draf izin. Jika tidak akan dibuatkan surat penolakan kepada pemohon oleh operator;
8. Operator menerima BAP, menghitung besaran retribusi untuk ijin-ijin yang berbayar, dan melakukan pencetakan serta penomoran pada draf izin kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi;
9. Pemohon membayar sesuai dengan besaran retribusi untuk ijin-ijin yang berbayar dan menyerahkan bukti pembayaran;
10. Kepala Seksi menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki;
11. Kepala Bidang menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki;
12. Kepala Dinas menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan tandatangan pada draf izin dan diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki;
13. Meregister, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket penyerahan izin untuk diserahkan kepada pemohon
14. Loket Penyerahan Izin mengklasifikasikan dan Meregister Surat Ijin Yang Telah Terbit
15. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;

16. Semua jenis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan sebagai bagian dari Dokumen Negara;
17. Laporan data izin yang diterbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan non perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.4. Isu Strategis

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan non perizinan serta penanaman modal;

- e. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
- 1) Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
 - 2) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - 4) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 5) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- e. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.

1.4.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
- f. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
- g. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
- h. Penyediaan data terkait dengan potensi dan peluang investasi sudah valid sehingga promosi yang dilaksanakan juga sudah optimal.
- i. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Namun demikian, sebelum diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, terlebih dahulu diuraikan perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena perjanjian kinerja mengacu kepada RPJMD dan bertujuan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal agar pelaksanaan kegiatannya dapat sejalan dengan RPJMD dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat diukur dengan jelas.

2.1.1 Pernyataan Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota di antaranya *Smart city*, *Livable city*, *Sustainable Deevlopment Goals (SDGs)* serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2017-2022), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017-2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun



atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;



3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”.

2.1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif*” melalui tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya nilai investasi

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui:

- a. Meningkatnya kerjasama di bidang investasi



- b. Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- g. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

2.1.5 Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur

2.1.6 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan bagi investor;
- c. Menginventaris dan menyusun *feasibility study* terhadap potensi-potensi investasi;
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;

- e. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- f. Menyediakan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi;
- g. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;
- h. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan terdiri dari program dan kegiatan penunjang dan urusan wajib.

1) Program dan Kegiatan Penunjang

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah
 - n. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Mebeleur
 - b. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
 - c. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - g. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Anggaran SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
8. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
 - f. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi
9. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
 - b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
 - c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU
 - b. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame

11. Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
 - a. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan
 - b. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan.

2.2. Indikator Penetapan Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2022 seperti pada Lampiran 1.

2.2.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis DPMPSTP

dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan Tahun 2020 seperti terlampir pada Lampiran 3. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
	Terwujudnya Sebaran Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Nilai Investasi	Rp. 1.273.878.834.000
1	Terwujudnya Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase Peningkatan Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	70 %
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 Nilai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2020

Target investasi pada tahun 2020 adalah Rp. 1.273.878.834.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta*

Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), dan realisasinya adalah adalah Rp. 1.103.792.763.786,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan capaian atau sekitar 86,65% dari target. Nilai Investasi dari PMDN sebesar Rp. 635.298.134.294,00 atau sekitar 57,56% dari total realisasi investasi dan dari PMA sebesar Rp. 249.807.730.000,00 atau sekitar 22,63% dari total realisasi investasi dan dari SIUP sebesar Rp. 218.686.899.492,00 atau sekitar 19,81% dari total realisasi investasi. Tabel 3.1 adalah data realisasi investasi dari Triwulan I-Triwulan IV.

Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2020

TW	Realisasi Investasi			Tenaga Kerja (Orang)
	PPM	SIUP	Total	
I	Rp 305.348.521.551	Rp 33.045.999.746	Rp 338.394.521.297	84
II	Rp 116.831.730.000	Rp 16.217.500.000	Rp 133.049.230.000	100
III	Rp 371.476.157.892	Rp 34.607.950.000	Rp 406.084.107.892	528
IV	Rp 91.449.454.851	Rp 134.815.449.746	Rp 226.264.904.597	1080
	Rp 885.105.864.294	Rp 218.686.899.492	Rp 1.103.792.763.786	1.792

Namun jika dihitung persentase peningkatan nilai investasi dari target 1% tidak dapat tercapai karena nilai realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp. 42.469.707.639.707 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.103.792.763.786 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 41.365.914.875.921 atau sebesar 97,40%. Nilai ini diperoleh dari formulasi/cara pengukuran sesuai yang tercantum pada IKU yaitu dengan rumus “jumlah realisasi tahun berjalan-jumlah realisasi tahun lalu/jumlah realisasi tahun lalu 100%”. Realisasi investasi tahun 2020 masih lebih kecil dari realisasi 2019, hal ini dikarenakan pada tahun ini tidak ada investasi yang nilainya besar seperti pada tahun 2019 seperti PLTU yang mencapai Rp. 17.714.640.000.000, hotel dan restoran mencapai Rp. 5.700.721.316.870, PMA (PLTG) sebesar Rp. 9.701.999.992.848, tersier dan jasa lainnya mencapai Rp. 1.650.200.000.000. Selain itu karena adanya kondisi pandemi COVID 19 terutama di triwulan II yang tidak mencapai target dengan nilai investasi yang cukup kecil.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.273.878.834.000	Rp. 1.103.792.763.786 86,65%	(97,40%)

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



baru menangani urusan penanaman modal pada tahun 2017.

Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017-2020

Tahun	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
2017	Rp. 1.092.662.246.708	3.763
2018	Rp. 13.566.022.871.669	2.031
2019	Rp. 42.614.923.177.495	6.814
2020	Rp. 1.103.792.763.786	1.792

Pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2017-2022 hanya terdapat 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Perbandingan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 dengan tahun 2020 adalah seperti pada tabel 3.3.

Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2019 dan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.261.266.173.000 (1%)	Rp. 42.614.923.177.495 (214,13%)	3378,74 %	Rp. 1.273.878.834.000 (1%)	Rp. 1.103.792.763.786 (-97,40%)	86,65%

Sedangkan untuk realisasi kinerja pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah seperti pada tercantum pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	%		100	126,11	100		110,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Exemplar		1.200	5.262	1.300	3.045	234,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	Rekening Kantor		84	84	84	84	100,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	Unit/Bulan		2	2	24	24	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	Unit		22	22	21	21	100,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	Dokumen		1	1	12	12	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	Jenis		28	28	28	28	100,00

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	Jenis		50	50	53	53	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	Jenis		9	9	9	9	100,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	Jenis		4	4			
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit		24	24	42	42	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Rekening/Tahun		36	36	9	9	100,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	Jenis		6	6	7	7	100,00
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	OH		115	146	50	50	100,00
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	Dokumen		2	2	1	1	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	%		100	100	100		100,00
16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	Set/Paket		-	-	2	2	100,00
17	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	Jenis		6	6	7	7	100,00
18	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	Kegiatan		10	10	6	6	100,00
20	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Unit		22	22	21	21	100,00
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	Unit		7	7	7	7	100,00
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	Unit		7	15	15	15	100,00
23	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	Dokumen		4	4	4	4	100,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%		100	100	100		0
28	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Kali		1	1			

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%		100	100	100		0
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	OH		-	-			
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%		100	100	100		100
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	Dokumen'		6	6	10	10	100,00
31	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Laporan		1	1	1	1	100,00
VI	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Dokumen		4	4	4	4	100
32	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	Dokumen		4	4	4	4	100,00
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/Jumlah investor	Kali/ Investor		1/5	7/5	1/5	1/6	106,67
33	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	Kali		1	1	1	1	100,00
34	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	Investor		5	5	5	6	120,00
35	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	Kali		7	7	1	1	100,00
VIII	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rupiah		1.261.266.173.000	42.469.707.639.707	1.286.617.623.000	1.103.792.763.786	110,33
36	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	Sistem		1	1	1	1	100,00
37	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Dokumen		1	1	1	1	100,00
38	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Dokumen		4	4	4	4	100,00

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
39	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pengusaha		100	100	50	81	162,00
40	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame di sistem	Sistem		1	1	1	1	100,00
41	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	100,00
IX	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		100	100	100		100,00
42	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	Buku		-	-	4	4	100,00
43	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	Kecamatan		-	-	3	3	100,00
44	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen		-	-	2	2	100,00
X	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	Nilai		80,80	131,4	81,00	81,09	98,10
45	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	-	2500	2010	80,40
46	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	-	500	579	115,8
XI	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	Nilai		80,80	137,87	81,00	81,09	102,74
47	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	-	1500	1510	100,67
48	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	-	1500	1572	104,80

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	%	100					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	26	-	-			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen anggaran yang disusun (RKA, DPA, Pergeseran, DPPA) - Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (LPPD, LKPJ, SOP dan SP) - Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun (LAKIP) - Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun	Dokumen/ Laporan/ Dokumen/ Dokumen	4/1/16/3					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan	1					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kali evaluasi dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Laporan	1	-	-			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu - Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Laporan/ %	12/100	-	-			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	Tahun	1					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	Dokumen	2					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	Dokumen	1					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan rekonsiliasi)	Laporan	12					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	-	-			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	-	-			

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	8					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah jenis sarana/prasarana upacara - Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Jenis/Kali	7/1					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Jenis	8					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Rekening	36					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	Jenis	6					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	OH	115	-	-			
4	Penyediaan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	-	-			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar	Exemplar	1400					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon dan listrik	Rekening Kantor	84					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Unit/Bulan	2					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah alat kebersihan - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Jenis/ Jenis / Unit	28/50/1 5					
5	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	-	-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit/Unit	19/19					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	15					

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	7					
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Kali/Investor	1/5					
6	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang diikuti	Kali	7	-	-			
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman modal	Dokumen	1					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Kali	7					
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Rupiah	1.286.617.623.000					
7	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Nilai	81,25	-	-			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Izin	6000					
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	6000					
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen	2					
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Rupiah	1.286.617.623.000					
8	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Dokumen	4	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Dokumen	4					

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target 2021	Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Dokumen	4					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dokumen	4					
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Rupiah	1.286.617.623.000					
9	Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi	Laporan	4	-	-			
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	Media	3					
TOTAL						109,54			103,13

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Perencanaan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan Renstra 2017-2022 seperti pada Lampiran 2. Capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2020 seperti terlampir pada Lampiran 4.

d. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif yang telah dilakukan

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 tidak mencapai target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.273.878.834.000,00 dan realisasinya adalah Rp. 1.103.792.763.786, dengan capaian 86,65%, dari target 1% tidak tercapai malah mengalami penurunan sebesar 97,40%. Data nilai investasi PMDN, PMA dan SIUP, serta data nilai investasi per sektor dapat dilihat pada Lampiran 9.

Pada tahun 2020 nilai investasi yang besar hanya dari sektor tersier PMDN Rp. 587.955.764.294,00 atau sebesar 53,27% dari total nilai investasi dan PMA sebesar Rp. 249.807.730.000 atau sekitar 22,63% dari total nilai investasi, nilai investasi

terbesar kedua dari SIUP yaitu sebesar Rp. 218.686.899.492 atau sekitar 19,81% dari total investasi, sedangkan sektor primer hanya sebesar Rp. 39.096.800.000 atau sekitar 3,54% dari total investasi dan sektor sekunder dengan nilai investasi terendah yaitu sebesar Rp. 8.245.570.000 atau sekitar 0,75%. Sehingga total nilai investasi pada tahun 2020 tidak mencapai target yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan karena pada tahun ini tidak ada investasi yang nilainya besar seperti pada tahun 2019 seperti PLTU yang mencapai Rp. 17.714.640.000.000, hotel dan restoran mencapai Rp. 5.700.721.316.870, PMA (PLTG) sebesar Rp. 9.701.999.992.848, tersier dan jasa lainnya mencapai Rp. 1.650.200.000.000. Selain itu karena adanya kondisi pandemi COVID 19 terutama di triwulan II yang tidak mencapai target dengan nilai investasi yang cukup kecil dan masih berlangsung sampai saat ini sehingga banyak investor yang menunda untuk berinvestasi.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 5 (lima) program pilihan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yaitu 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 2) Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi, 3) Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan, 4) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dan 5) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 3 (*tiga*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 106,67%, dan realisasi capaian keuangannya 100% dengan realisasi sebesar Rp. 184.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 184.500.000,00. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah dari anggaran Rp. 52.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.250.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari anggaran Rp. 52.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.800.000,00 dengan capaian fisik sebesar 120%. Dan kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari anggaran Rp. 78.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 78.450.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program kedua yaitu Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 110,33%, dan realisasi capaian keuangannya 99,89% dengan realisasi sebesar Rp. 281.605.350,00 dari anggaran sebesar Rp. 281.911.000,00. Program ini terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal capaian fisik dan keuangannya mencapai 100%, kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal capaian fisik dan keuangannya juga mencapai 100%,

kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.30% dari anggaran Rp. 83.913.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.662.350,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0,58% dari anggaran Rp. 8.645.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.595.000,00 dengan capaian fisik sebesar 162% karena dari target 50 poengusaha yang dibina mampu terealisasi sejumlah 81 pengusaha, kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal dengan capaian fisik dan keuangan sebesar 100%, dan kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait investasi dengan tingkat efisiensi sebesar 0,02% dari anggaran Rp. 23.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.295.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program Ketiga adalah Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99.25% dengan realisasi sebesar Rp. 415.143.388,00 dari anggaran sebesar Rp. 419.597.300,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan pertama yaitu Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan capaian fisik dan keuangannya mampu mencapai 100%, kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu dengan tingkat efisiensi sebesar 1.87% dari anggaran Rp. 64.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 63.000.000,00 dengan capaian 98,17%. Dan kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.19% dari anggaran Rp. 55.511.729,00 terealisasi sebesar Rp. 55.404.329,00.

Program keempat yaitu Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian keuangannya 97.65% dengan realisasi sebesar Rp. 363.096.666,00 dari anggaran sebesar Rp. 365.001.000,00 dengan capaian fisik sebesar 98,10%. Kegiatan pertama yaitu Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,73% dari anggaran Rp. 246.623.500,00 terealisasi sebesar Rp. 244.820.368,00 dengan capaian fisik sebesar 99.27%. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame dengan tingkat efisiensi sebesar 0,09% dari anggaran Rp. 118.377.500,00 terealisasi sebesar Rp. 118.276.298,00 dengan capaian fisik sebesar 115.80%.

Program terakhir yaitu Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian keuangannya 99.97% dengan realisasi sebesar Rp. 414.397.048,00 dari



anggaran sebesar Rp. 414.538.888,00 dengan capaian fisik sebesar 102,74%. Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,04% dari anggaran Rp. 218.118.458,00 terealisasi sebesar Rp. 218.030.138,00 dengan capaian fisik sebesar 100,67% sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.18% dari anggaran Rp. 196.420.430,00 terealisasi sebesar Rp. 196.366.910,00 dengan capaian fisik sebesar 104,80%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

- Program/kegiatan yang melampaui target

Penyediaan jasa surat menyurat dari target 100% mampu tercapai 234,23% karena banyaknya surat keluar yang terkirim, kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal, dari target 5 investor yang berminat menanamkan modalnya mampu terealisasi sebanyak 6 investor. Kegiatan Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dari target 50 pengusaha yang dibina mampu terealisasi sebanyak 81 pengusaha, kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK, Reklame dari target 500 ijin yang diterbitkan mampu tercapai sebanyak 579 ijin, Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan dari target 1500 ijin yang diterbitkan mampu tercapai sebanyak 1510 ijin dan terakhir kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan dari target 1500 ijin yang diterbitkan mampu tercapai sebanyak 1572 ijin.

- Program/kegiatan yang tidak mencapai target

Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI tidak mencapai target yaitu dari 2500 ijin yang diterbitkan hanya mampu terealisasi sebanyak 2.010 atau sekitar 80,40%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga pemohon ijin juga berkurang terutama IMB di mana pada tahun 2019 mampu diterbitkan sebanyak 2.967 ijin sedangkan pada tahun 2020 hanya bisa diterbitkan 1.870 ijin saja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2020 dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi dari target 1% tidak mencapai target malah mengalami penurunan sekitar 97,40%.

3.1.2. Capaian Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 14 (empat belas) kegiatan realisasi capaian fisiknya rata-rata sebesar 110,33 %, di mana pada umumnya serapan anggaran rata-rata telah mencapai 96,92 %. Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik sebanyak 3.045 eksamplar dari target yang ditentukan 1.300 examplar atau sekitar 234,23%, hal ini dikarenakan jumlah surat keluar yang tidak bisa diprediksi. Ada 1 (*satu*) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 80,00% yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dikarenakan pada tahun ini tidak ada penggantian Flat kendaraan sehingga ada efisiensi anggaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kami mampu berhemat atas penggunaan dari ketiga sarana tersebut terutama dari penggunaan Telepon dari target Rp. 3.654.842,00 hanya terpakai sebesar Rp. 3.066.741,00 atau sebesar 83,90%. Anggaran yang dialokasikan tidak semuanya harus terpakai, di mana untuk komponen penggunaan Air kami juga mampu menekan penggunaan air sehingga terjadi efisiensi di mana dari target Rp. 7.091.210 terealisasi sebesar Rp. 3.066.741 atau sekitar 67,83% karena pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaian air selama 1 tahun mengingat adanya pandemi dan adanya WFH yang pernah dilaksanakan sehingga penggunaan air juga berkurang seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2020

Jenis Pembayaran	Tahun 2020			
	Target	Realisasi	Persentase	Jumlah Pemakaian
Listrik (2 Rekening)				
- 551600002667	69.401.500	65.532.342	94.42 %	42.164 Kwh
- 551600115505				1.082 Kwh
Air	7.091.210	4.810.130	67.83 %	524 M ³

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 7 (*tujuh*) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 100% sedangkan untuk serapan anggaran yaitu 99,96%. Secara umum prosentase realisasi keuangan sudah lebih dari 90,00%, dan secara fisik sudah semua tercapai 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 (*satu*) kegiatan yaitu Bimbingan Rohani dan Budaya Aparatur pada anggaran induk direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 namun karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga pada anggaran perubahan dirasionalisasi, begitu juga dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur juga mengalami rasionalisasi anggaran.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 2 (*dua*) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi fisiknya mencapai 100,00% dan serapan anggarannya mencapai 95,58%. Pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dari anggaran Rp. 6.918.000 mampu terealisasi sebesar Rp. 5.449.400 atau sekitar 78,77% karena adanya kesalahan penginputan DPA di mana pada DPA uraiannya diketik *Jilid laporan keuangan* yang seharusnya dijadikan satu yaitu *cetak dan jilid laporan keuangan*, sehingga yang bisa dipertanggungjawabkan di SPJ hanya jilid laporan keuangan sesuai dengan standar harga.
5. Capaian Kinerja pada Program Penyusunan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100,00%, dan realisasi capaian keuangannya 100,00%.
6. Ada 2 (*dua*) program terkait dengan penanaman modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 3 (*tiga*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 106,67%, dan realisasi capaian keuangannya 100%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 1 kali atau sekitar 100,00%. *Matchmaking* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Nopember 2020 bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melalui aplikasi *zoom meeting/webinar*. Pemaparan materi kegiatan ini dibawakan oleh Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Ibu Ni Made Dwi Asrini, S.Sos. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama UMKM dengan Usaha Besar, meningkatkan daya saing UMKM, menggugah kepedulian Usaha Besar, membuka peluang pemasaran produk UMKM dan memudahkan usaha besar dalam perolehan bahan baku. Tujuan utamanya adalah agar pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID 19 dengan memfasilitasi kerjasama dengan usaha besar, perbankan dan permodalannya. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari target 5 investor yang berminat menanamkan modalnya terealisasi 6 investor atau 120% yaitu yaitu 1) Mr. Thomas (Australia), 2) Simon B.Schmidt (Jerman), 3) Silvia ten Houten (Hongkong), 4) Geoff Harrison (Amerika), 5) Wu Yih (Hongkong) dan 6) Tang Liang (China). Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 1 kali terealisasi 1 kali atau 100%. Pameran terlaksana 1 Kali yaitu pada saat Kunjungan tim ahli Konsulat Jendral Amerika Serikat ke Buleleng pada 10 Pebruari 2020

yang diterima langsung oleh Bapak Bupati Buleleng, Kepala Bappeda dan Plt. Kepala Dinas PMPTSP. Dalam kegiatan ini dipamerkan mengenai potensi dan peluang investasi dari Sektor Primer yaitu sektor pertanian diantaranya peluang investasi bidang penyediaan bibit dan budidaya, pengolahan serta pemasaran anggur di Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Banjar, manggis, durian, mangga, kopi di kecamatan Busungbiu, Seririt, Sukasada, Buleleng, Banjar, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula, Buah Naga di Kecamatan Kubutambahan, Stroberi di Kecamatan Sukasada, Salak Gula Pasir dan Salak Madu di Kecamatan Busungbiu. Sedangkan potensi sektor tersier yaitu Sektor Pariwisata peluang investasi berupa trekking, restoran, objek wisata dan air terjun, penataan jalan, pengembangan agrowisata. Dan terakhir sektor industri dengan potensi investasi dari pertenunaan Arta Dharma dan Pembangkit listrik tenaga gas serta peluang investasi berupa pemasaran, industri kelistrikan.

7. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 110,33%, dan realisasi capaian keuangannya 99,89%. Total nilai investasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.103.792.763.786 dari target Rp. 1.273.878.834.000 atau sekitar 86,65% dengan jumlah pelaku usaha dalam negeri sebanyak 81 pengusaha dari target 50 pengusaha karena dan pelaku usaha luar negeri sebanyak 13 pengusaha dari target 5 pengusaha karena adanya kemudahan dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perijinan, keamanan di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng serta peluang usaha yang menjanjikan misalnya seperti perkembangan tambak udang banyaknya peluang usaha investasi yang menguntungkan pihak investor dari berbagai sektor contoh pengembangan budidaya kerang mutiara.
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi mencakup 3 (*tiga*) kegiatan telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 100% dan serapan anggarannya 99,25 %. Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan diperoleh angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menyebarkan angket kepada 242 pemohon sebagai responden pada semester I dan 196 pemohon sebagai responden pada semester II. Target nilai IKM tahun 2020 adalah 81,00 pada Semester I terealisasi nilai IKM yaitu 81,01 di mana berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasarana, dengan nilai 3,0575, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Kecepatan Waktu Pelayanan, dengan nilai 3,1637 dan

3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan, dengan nilai 3,1681. Jika disandingkan dengan hasil survey pada Semester II Tahun 2019, rerata skor pada Semester I Tahun 2020 mengalami peningkatan tapi peringkat diantara capaian indikator survey masih sama menduduki peringkat 1, dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Buleleng dalam ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan mengalami kenaikan dari kategori baik menjadi kategori sangat baik, yang artinya para pengguna layanan merasa terpuaskan dalam hal penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Buleleng, hal ini dikarenakan DPMPTSP telah dapat menerima dan menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) bidang pengaduan yang telah ditetapkan.

Pada Semester II survey dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020 s.d 31 Desember 2020 terealisasi 81,16 atau sekitar 100,20 % dan berada pada kategori “BAIK” di mana berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0575, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Persyaratan, dengan nilai 3,3554 dan 3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan, dengan nilai 3,3582, sehingga rata-rata nilai IKM semester I dan semester II yaitu 81,09 dan ini berarti nilai IKM tahun 2020 sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,11%. Nilai IKM tahun 2020 seperti terlampir pada Lampiran 5.

9. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A, untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Izin Lokasi, IMB, Izin Prinsip, HO/SITU, dari target 2.500 Izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2.010 Izin, atau sekitar 80,40%, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga permohonan izin yang masuk tidak sebanyak tahun sebelumnya terutama pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2020 terealisasi sebanyak 1.870 ijin, berbeda dengan tahun 2019 yang mampu diterbitkan sebanyak 2.967 izin. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Izin IUJK, Reklame dari target 500 Izin mampu terealisasi sebanyak 579 Izin atau sekitar 115,80%. Jadi



untuk total Izin di bidang A dari target 3.000 Izin terealisasi sebanyak 2.589 Izin atau sekitar 86,30%. Data Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 7.

10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat B I,II pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan, kami menetapkan target sebanyak 1.500 Izin realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 1.510 Izin atau 100,67%, sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perizinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dari target sebanyak 1.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 1.572 Izin atau sekitar 104,80%. Data Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 8.

Jumlah total Izin terbit Bidang B dari target 3.000 Izin mampu terealisasi sebanyak 3.082 Izin atau sekitar 102,73%. Jadi total jumlah Izin terbit baik di bidang A maupun di Bidang B selama tahun 2020 dari target 6.000 Izin terealisasi sebanyak 5.671 Izin atau sebesar 94,52%. Pada tabel 3.8 merupakan Rekap data ijin terbit dari Bidang A dan Bidang B pada tahun 2020.

Tabel 3.7 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2020

Bidang/ Seksi	Non Perizinan			Perizinan			Ijin Terbit Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Bidang A									
A/I,II	200	140	70,00	2300	1870	81,30	2500	2010	80,40
A/III	150	165	110,00	350	414	118,29	500	579	115,80
TOTAL IZIN TERBIT BIDANG A							3000	2589	86,30
Bidang B									
B/I,II	500	669	133,80	1000	841	84,10	1500	1510	100,67
B/III	700	692	98,86	800	880	110,00	1500	1572	104,80
TOTAL IZIN TERBIT BIDANG B							3000	3082	102,73
TOTAL IZIN TERBIT							6000	5671	94,52

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 1,39% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 3.063.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.020.647.364,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 8,51% yaitu dari anggaran sebesar Rp 2.999.252.500,00 terealisasi sebesar Rp 2.744.185.058,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
I	Belanja Tidak Langsung	2.999.252.500	2.744.185.058	255.067.442	91,49
	1. Belanja Pegawai	2.999.252.500	2.744.185.058	255.067.442	91,49
II	Belanja Langsung	3.063.000.000	3.020.647.364	42.352.636	98,62
	1. Belanja Pegawai	48.222.000,00	48.222.000	0	100,00
	2. Belanja Barang Jasa	2.805.186.800,00	2.762.835.964	42.350.836	98,49
	3. Belanja Modal	209.591.200,00	209.589.400	1.800	99,99
	Total Belanja Daerah	6.062.252.500	5.764.832.422	297.420.078	95,09

Sumber data :LRA DPMPTSP Kabupaten Buleleng TA. 2020
(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 6. Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran program dan kegiatan untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.204.419.645,00	1.167.339.539,00	37.080.106,00	98,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.237.398,00	89.498.692,00	6.738.706,00	86,53
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.215.322,00	194.215.322,00	0,00	96,77
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.800.000,00	5.377.600,00	1.422.400,00	61,14
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	141.056.000,00	140.886.300,00	169.700,00	99,88
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	182.732.500,00	182.728.373,00	4.127,00	98,55
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	232.213.200,00	203.551.260,00	28.661.940,00	87,66
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.467.000,00	3.464.967,00	2.033,00	93,75
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	99,87
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.591.400,00	189.591.400,00	0,00	99,89
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.481.825,00	21.481.825,00	0,00	99,73
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	47.725.000,00	47.643.800,00	81.200,00	99,55
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	98,69

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	338.649.038,00	338.510.132,00	138.906,00	99,96
15	Pengadaan Mebeleur	19.999.800,00	19.998.000,00	1.800,00	97,61
16	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	172.700.000,00	172.691.070,00	8.930,00	99,96
17	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	9.999.200,00	9.999.000,00	200,00	100,00
18	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	101.150.038,00	101.090.692,00	59.346,00	99,94
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	7.000.000,00	6.996.770,00	3.230,00	99,99
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	5.000.000,00	4.934.600,00	65.400,00	99,98
21	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	99,64
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
23	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.334.700,00	31.861.200,00	1.473.500,00	95,58
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.416.700,00	26.411.800,00	4.900,00	99,80
25	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.918.000,00	5.449.400,00	1.468.600,00	78,77
VI	Program Perencanaan Anggaran SKPD	65.284.000,00	65.283.010,00	990,00	100,00
26	Penyusunan Anggaran SKPD	65.284.000,00	65.283.010,00	990,00	100,00
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	100,00
27	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	97,94
28	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	88,08
29	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	78.450.000,00	78.450.000,00	0,00	99,07
VIII	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	281.911.000,00	281.605.350,00	305.650,00	99,89
30	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	81.930.000,00	81.930.000,00	0,00	99,73
31	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	22.875.000,00	22.875.000,00	0,00	99,18
32	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	83.913.000,00	83.662.350,00	250.650,00	99,70

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
33	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.645.000,00	8.595.000,00	50.000,00	98,21
34	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	61.248.000,00	61.248.000,00	0,00	99,80
35	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	23.300.000,00	23.295.000,00	5.000,00	97,82
IX	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	175.361.729,00	174.054.329,00	1.307.400,00	98,93
36	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	55.650.000,00	55.650.000,00	0,00	100,00
37	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	64.200.000,00	63.000.000,00	1.200.000,00	98,13
38	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	55.511.729,00	55.404.329,00	107.400,00	99,81
X	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	365.001.000,00	363.096.666,00	1.904.334,00	97,65
39	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	246.623.500,00	244.820.368,00	1.803.132,00	98,53
40	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	118.377.500,00	118.276.298,00	101.202,00	99,91
XI	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	414.538.888,00	414.397.048,00	141.840,00	99,97
41	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	218.118.458,00	218.030.138,00	88.320,00	99,67
42	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	196.420.430,00	196.366.910,00	53.520,00	99,82
TOTAL		3.063.000.000,00	3.020.647.274,00	42.352.726,00	98,62

BAB IV

PENUTUP

Dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab IV Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat di simpulkan secara umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2020 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2020. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

1. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan Izin dan pembayaran retribusi.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha (badan usaha/perorangan) untuk mencari izin usahanya.
3. Adanya pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
4. Sulit menghubungi dan bertemu penanggung jawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Ada dua Target Retribusi yang belum tercapai yaitu Retribusi Ijin pengendalian menara telekomunikasi (35,44%) karena ada beberapa wajib retribusi tahun 2020 yang belum melunasi kewajibannya sehingga piutang di tahun 2021 dan Retribusi ijin memperkerjakan tenaga asing (52,63%) karena mengingat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 sehingga pengguna TKA tidak memperpanjang penggunaan TKA.
7. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi



permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

1. Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan non perijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
2. Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan non perijinan yang uptodate, valid dan terukur serta melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk penyusunan data potensi desa.
3. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
4. Mengoptimalkan kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan non perijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui media elektronik, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya dengan penerapan aplikasi siCANTIK, GIS reklame, Sitawa, Profil Investasi, OSS, dan LKPM Online.
6. Monitoring dan peninjauan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih paham mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.
7. Terkait dengan OSS perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.
8. Untuk perusahaan yang belum melunasi kewajibannya pada tahun 2020 sudah diberikan teguran pertama.
9. Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi sarana dan prasarana (gedung kantor, alat kerja, dll), kompetensi personil dan implementasi ISO 9001-2015, serta anggaran, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a. Upaya perbaikan dari unsur Kualitas Sarana dan Prasarana yaitu DPMPTSP Kabupaten Buleleng telah menempati gedung kantor baru yang sesuai dengan standar PTSP, dan pada Tahun Anggaran 2021 (DPA DPMPTSP Tahun 2021) telah dianggarkan untuk pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan perencanaan pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP).
 - b. Upaya perbaikan dari unsur Persyaratan, yaitu melalui optimalisasi koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memaksimalkan sosialisasi terkait kewajiban pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan Jaminan Sosial terhadap para pekerja (pegawai) dengan mengikutsertakan para pekerja (pegawai) dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Upaya perbaikan dari unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan, yaitu melalui penerapan koreksi berjenjang terhadap izin dan nonizin yang telah selesai dicetak sebelum

dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas, mulai dari petugas pencetakan, staf, Kepala Seksi dan Kepala Bidang, sehingga diharapkan akan memperkecil kesalahan redaksional dalam izin dan nonizin yang tercetak.

Akhirnya, kesimpulan kami terhadap pencapaian target indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan kami. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG
NOMOR	:	050/28/DPMPTSP/2018
TANGGAL	:	14 FEBRUARI 2018
TENTANG	:	INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	<p>Penjelasan (Alasan) :</p> <p>Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK</p> <p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	DPMPTSP	DPMPTSP	Realisasi Investasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG



IPUTU KARUNA

Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Nilai Investasi 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2018		2019		2020		2021		2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	1.236.414. 246.708	1.248.778 .389.000 (1%)	13.566.022. 871.669 (997.21%)	1.261.266 .173.000 (1%)	42.614.923. 177.495 (214,13%)	1.273.878 .835.000 (1%)	1.103.792 .763.786 (-97,40%)	1.286.617 .623.000 (1%)	-	1.299.483 .799.000 (1%)	-	1.299.483 .799.000 (1%)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Kuta, S.Sos

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST

PIHAK PERTAMA,

I Made Kuta, S.Sos
NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

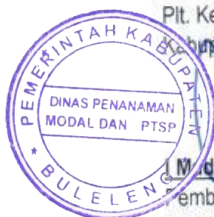
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sebaran Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Nilai Investasi	Rp. 1.273.878.834.000
	1 Terwujudnya Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase Peningkatan Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	70 %
	2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 338.909.800,00	APBD 2020
2	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	Rp 577.660.000,00	APBD 2020
3	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	Rp 241.250.000,00	APBD 2020
4	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	Rp 467.130.000,00	APBD 2020
5	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	Rp 501.360.000,00	APBD 2020

Singaraja, 8 Januari 2020



Bupati Buleleng,
Pritu Agus Suradnyana, ST



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
 Kabupaten Buleleng,

M. de Kuta, S.Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Kuta, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,



Putu Agus Suradnyana, ST

PIHAK PERTAMA,



I Made Kuta, S.Sos

NIP. 19700710 199203 1 007

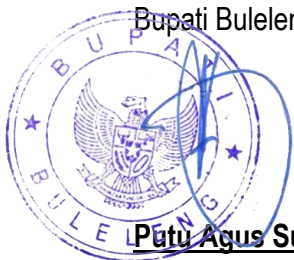
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sebaran Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Nilai Investasi	Rp. 1.273.878.834.000
	1 Terwujudnya Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase Peningkatan Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	70 %
	2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 184.500.000,00	APBD 2020
2	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	Rp 281.911.000,00	APBD 2020
3	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	Rp 175.361.729,00	APBD 2020
4	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	Rp 365.001.000,00	APBD 2020
5	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	Rp 414.538.888,00	APBD 2020

Singaraja, 14 Oktober 2020

Bupati Buleleng,



Putu Agus Suradnyana, ST

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya Sebaran Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Nilai Investasi	Rupiah	1.273.878.834.000	Triwulan I	254.775.766.800	338.394.521.297	132,82	Nilai investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 1.103.792.763.786 dari target Rp. 1.273.878.834.000 atau sekitar 86,65%. Investasi PMDN sebesar Rp. 635.298.134.294,00 atau sekitar 57,56% dari total realisasi investasi dan dari PMA sebesar Rp. 249.807.730.000,00 atau sekitar 22,63% dari total realisasi investasi dan dari SIUP sebesar Rp. 218.686.899.492,00 atau sekitar 19,81% dari total realisasi investasi. Pda tahun 2020 realisasi investasi belum mencapai target yang ditentukan karena adanya kondisi pandemi COVID 19 terutama di triwulan II yang tidak mencapai target dengan nilai investasi yang cukup kecil.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	184.500.000	Triwulan I	46.125.000	30.500.000	66,12	
Triwulan II	92.250.000	77.000.000	83,47													
Triwulan III	138.375.000	122.300.000	88,38													
Triwulan IV	184.500.000	184.500.000	100,00													
1	Terwujudnya Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase Peningkatan Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase	70 %	Triwulan I	10,00	(98,86)	-988,58	Nilai Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 42.469.707.639.707 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.103.792.763.786 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 41.365.914.875.921 atau sebesar 97,40%. Realisasi investasi tahun 2020 masih lebih kecil dari realisasi 2019, hal ini dikarenakan pada tahun ini tidak ada investasi yang nilainya besar seperti pada tahun 2019 seperti PLTU yang mencapai Rp. 17.714.640.000.000, hotel dan restoran mencapai Rp. 5.700.721.316.870, PMA (PLTG) sebesar Rp.9.701.999.992.848, tersier dan jasa lainnya mencapai Rp. 1.650.200.000.000. Selain itu karena adanya kondisi pandemi COVID 19 terutama di triwulan II yang tidak mencapai target dengan nilai investasi yang cukup kecil.	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	281.911.000	Triwulan I	70.477.750	71.383.000	101,28	
Triwulan II	140.955.500	118.646.950	84,17													
Triwulan III	211.433.250	199.294.950	94,26													
Triwulan IV	281.911.000	281.605.350	99,89													

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,00	Triwulan I	0	0,00	0,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2020 adalah 81,01 , dan berada pada kategori " BAIK " (pada nilai interval konversi: 76,61 s/d 88,30), dari 242 responden diperoleh hasil terdapat 3 unsur pelayanan yang diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah yaitu Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0575, Peringkat 8 yaitu unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3,1637, dan peringkat ke-7 yaitu unsur Produk Spesifik Jenis Pelayanan dengan nilai 3,1681 namun di semua unsur pelayanan masuk dalam kategori " BAIK ", yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan, sehingga nilai IKM semester I sebesar sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,01% . Sedangkan pada Semester II tahun 2020 nilai IKM sebesar 81,16 atau sekitar 100,20 % dan berada pada kategori " BAIK " dengan jumlah responden sebanyak 196 responden.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	175.361.729	Triwulan I	43.840.432	27.621.729	63,01	
						Triwulan II	87.680.865	66.604.329				75,96				
						Triwulan III	131.521.297	112.504.329				85,54				
						Triwulan IV	175.361.729	174.054.329				99,25				
						Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	365.001.000	Triwulan I		91.250.250	49.926.000	54,71				
								Triwulan II		182.500.500	175.231.468	96,02				
								Triwulan III		273.750.750	254.107.468	92,82				
								Triwulan IV		365.001.000	363.096.666	99,48				
						Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	414.538.888	Triwulan I		103.634.722	71.487.960	68,98				
								Triwulan II		207.269.444	163.685.848	78,97				
								Triwulan III		310.904.166	271.431.848	87,30				
								Triwulan IV		414.538.888	414.397.048	99,97				
TOTAL										1.421.312.617		1.421.312.617	1.417.653.393	99,74		

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Mad Kuta, S.Sos

Revisi (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

Lampiran 5. Nilai IKM Tahun 2020

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER I TAHUN 2020	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PTSP
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">81,01</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">(BAIK)</p>	<p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 242 Responden</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 117 Responden P = 125 Responden</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0 Responden SMP = 4 Responden SMA/SMK = 116 Responden Dipl = 14 Responden S 1 = 105 Responden Lainnya = 4 Responden</p> <p>Periode Survey (02 - 01 - 2020 s/d 30 - 6 - 2020)</p>
	<p>TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT</p>

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER II TAHUN 2020	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PTSP
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">81,16</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">(BAIK)</p>	<p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 196 Responden</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 97 Responden P = 99 Responden</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0 Responden SMP = 3 Responden SMA/SMK = 91 Responden Diploma = 17 Responden S 1 = 80 Responden Lain-lain = 5 Responden</p> <p>Periode Survey (01 - 07 - 2020 s/d 31 - 12 - 2020)</p>
	<p>TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT</p>

Lampiran 6. Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2020

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi	1 Input (masukan)						
	Perkantoran	Dana	Rp	61.200.000	61.200.000	100,00		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	exp	1300	3.045	234,23		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						144,74		
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Input (masukan)						
	Air dan Listrik	Dana	Rp	96.237.398	89.498.692	93,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	Rek/Tahun	84	84	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						97,67		
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Input (masukan)						
	Perlengkapan Kantor	Dana	Rp	194.215.322	194.215.322	100,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		jumlah kendaraan yang di sewa	unit/bulan	24	24	100,00		
		3 Out Come (Hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	6.800.000	5.377.600	79,08		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	Unit	21	21	100,00	sesuai dengan kebutuhan	
		3 Out Come (Hasil)					pembayaran pajak kendaraan	
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93,03		
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	141.056.000	140.886.300	99,88		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	dok	12	12	100,00		
		3 Out Come (Hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,96		
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	182.732.500	182.728.373	100,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	jenis	28	28	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Alat Tulis Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	232.213.200	203.551.260	87,66		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah ATK tersedia tepat waktu	jenis	53	53	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						95,89		
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan	1 Input (masukan)						
	Penggandaan	Dana	Rp	3.467.000	3.464.967	99,94		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah Barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	jenis	9	9	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,98		
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	1 Input (masukan)						
	Penerangan Bangunan Kantor	Dana	Rp	-	-		Rasionalisasi Anggaran	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	jenis					
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%					
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Input (masukan)						
	Kantor	Dana	Rp	189.591.400	189.591.400	100,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	42	42	100,00		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Input (masukan)						
	Perundang- undangan	Dana	Rp	4.900.000	4.900.000	100,00	Pembayaran koran bulan Nopember dan Desember sedang dalam	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	rek	9	9	100,00	proses	
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	21.481.825	21.481.825	100,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	jenis	7	7	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	1 Input (masukan)						
	Keluar Daerah/Dalam Daerah	Dana	Rp	47.725.000	47.643.800	99,83		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	OH	50	50	100,00	Rasionalisasi Anggaran	
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,94		
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	1 Input (masukan)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dana	Rp	22.800.000	22.800.000	100,00	tenaga kontrak (1 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah administrasi kepegawaian terselesaikan	dok	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Input (masukan)						
	<i>Kegiatan:</i>	Dana	Rp	19.999.800	19.998.000	99,99		
1.02.12.1.02.12.01.02.010	pengadaan Mobeleur	2 Out Put (keluaran)						
		jumlah sarana prasarana	set	2	2	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	set	2	2	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/	1 Input (masukan)						
	Prasarana Upacara	Dana	Rp	172.700.000	172.691.070	99,99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	jenis	7	7	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	jenis	7	7	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari	1 Input (masukan)						
	Besar Nasional	Dana	Rp	9.999.200	9.999.000	100,00		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	keg	6	6	100,00		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	keg	6	6	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	1 Input (masukan)						
	Dinas/Operasional	Dana	Rp	101.150.038	101.090.692	99,94	tenaga kontrak sopir (2 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	unit	21	21	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	21	21	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,98		
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	1 Input (masukan)						
	Gedung Kantor	Dana	Rp	7.000.000	6.996.770	99,95		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	unit	7	7	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	7	7	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,98		
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	1 Input (masukan)						
	Gedung Kantor	Dana	Rp	5.000.000	4.934.600	98,69		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	unit	15	15	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	15	15	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,56		
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset	1 Input (masukan)						
	Barang Milik Daerah	Dana	Rp	22.800.000	22.800.000	100,00	tenaga kontrak (1 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	dok	4		100,00		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4			
		3 Out Come (hasil) Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	dok	4	4	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Input (masukan) Dana	Rp				Rasionalisasi anggaran	
		2 Out Put (keluaran) Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	kali					
		3 Out Come (hasil) Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%					
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas	1 Input (masukan)						
	Sumber Daya Aparatur	Dana	Rp				Rasionalisasi anggaran	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	OH					
		3 Out Come (hasil) Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%					
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN								
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Input (masukan) Dana	Rp	26.416.700	26.411.890	99,98		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	dok	10	10	100,00		
		3 Out Come (hasil) Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,99		
1.02.12.1.02.12.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan	1 Input (masukan)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	akhir tahun	Dana	Rp	6.918.000	5.449.400	78,77	Foto Copy sedang dalam proses	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	lap	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	100,00	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						92,92		
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Input (masukan)						
	<i>Kegiatan:</i>	Dana	Rp	65.284.000	65.283.010	100,00		
1.02.12.1.02.12.01.07.001	Penyusunan Anggaran SKPD	2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	dok	4	4	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	dok	4	4	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan	1 Input (masukan)						
	Kerjasama investasi	Dana	Rp	53.250.000	53.250.000	100,00	tenaga kontrak (2 orang)	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM Investor yang ditindaklanjuti dengan MOU	kali	1	1	100,00	Rasionalisasi anggaran	
	kerjasama strategis antar usaha besar	3 Out Come (hasil)						
	dan usaha kecil menengah	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	kali	1	1	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	1 Input (masukan)					Nama Calon Investor:	
		Dana	Rp	52.800.000	52.800.000	100,00	1. Mr. Thomas (Australia)	
		2 Out Put (keluaran)					2. Simon B.Scmidt (Jerman)	
		Jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya	investor	5	6	120,00	3. Silvia ten Houten (Hongkong)	
		3 Out Come (hasil)					4. Geoff Harrison (Amerika)	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah investor	investor	5	6	120,00	5. Wu Yih (Hongkong)	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						113,33	6. Tang Liang (China)	
1.02.12.1.02.12.01.15.014	Penyusunan sarana prasarana promosi	1 Input (masukan)						
	penanaman modal	Dana	Rp	78.450.000	78.450.000	100,00	tenaga kontrak (3 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	kali	1	1	100,00	Rasionalisasi anggaran	
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	kali	1	1	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Perencanaan dan Peningkatan	1 Input (masukan)						
	Realisasi Investasi	Dana	Rp	81.930.000	81.930.000	100,00	tenaga kontrak (2 orang)	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.19.001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	sistem	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						95,55		
1.02.12.1.02.12.01.19.002	Kajian kebijakan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	22.875.000	22.875.000	100,00	tenaga kontrak (1 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	dok	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						95,55		
1.02.12.1.02.12.01.19.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	83.913.000	83.662.350	99,70	tenaga kontrak (1 orang)	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	dok	4	4,00	100,00	dalam proses penyusunan	
		3 Out Come (hasil)					laporan	
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						95,45		
1.02.12.1.02.12.01.19.004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	8.645.000	8.595.000	99,42		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah pengusaha yang paham dengan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	pengusaha	50	81	162,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						116,02		
1.02.12.1.02.12.01.19.005	Penyusunan perencanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	61.248.000	61.248.000	100,00	tenaga kontrak (1 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	dok	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						95,55		
1.02.12.1.02.12.01.19.007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait	1 Input (masukan)						
	dengan investasi	Dana	Rp	23.300.000	23.295.000	99,98	tenaga kontrak (1 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	dok	1	1	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai investasi	nilai	1.273.878.834.000	1.103.792.763.786	86,65		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						95,54		
1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	55.650.000	55.650.000	100,00	tenaga kontrak (2 orang)	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.20.001	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	buku	4	4,00	100,00	laporan sedang dalam proses penyusunan	
		3 Out Come (hasil)						
		Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,00		
1.02.12.1.02.12.01.20.002	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	64.200.000	63.000.000	98,13	tenaga kontrak (2 orang)	
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah media sosialisasi perijinan	media	3	3	100,00		
		3 Out Come (hasil)						
		Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,38		
1.02.12.1.02.12.01.20.003	Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	55.511.729	55.404.329	99,81		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	dok.	2	2,00	100,00	laporan dalm proses penyusunan	
		3 Out Come (hasil)						
		Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99,94		
1.02.12.1.02.12.01.21.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	246.623.500	244.820.368	99,27	tenaga kontrak (7 orang)	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.21.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	2500	2.010	80,40	adanya pandemi covid-19 sehingga pemohon ijin juga berkurang	
	Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan	3 Out Come (hasil) indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan A	nilai	81,00	81,09	100,11		
	Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi							
	IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI							
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93,26		
1.02.12.1.02.12.01.21.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian, Perikanan	Dana	Rp	118.377.500	118.276.298	99,91	tenaga kontrak (4 orang)	
	dan Ijin IUJK, Reklama	2 Out Put (keluaran) Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan dan Ijin IUJK, Reklama yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	500	579	115,80	adanya pandemi covid-19 sehingga pemohon ijin juga berkurang	
		3 Out Come (hasil) indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan A	nilai	81,00	81,09	100,11		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						105,28		
1.02.12.1.02.12.01.22.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan	1 Input (masukan)						
	bidang B	Dana	Rp	218.118.458	218.030.138	99,96	tenaga kontrak (6 orang)	
	Kegiatan:	2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah berkas permohonan perizinan sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	1500	1.510	100,67		
1.02.12.1.02.12.01.22.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	3 Out Come (hasil) indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan B	nilai	81,00	81,09	100,11		
	Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sector Perindustrian,Perdagangan							

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Pendidikan							
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100,25		
1.02.12.1.02.12.01.22.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat B III	Dana	Rp	196.420.430	196.366.910	99,97	tenaga kontrak (7 orang)	
	pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah berkas permohonan perizinan sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	1500	1.572	104,80		
		3 Out Come (hasil)						
		indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan B	nilai	81,00	81,09	100,11		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						101,63		

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

REKAP PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.204.419.645	1.167.339.539	96,92	110,33	100,00	102,40
1.02.12.1.02.12.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	DBH PPH, DAU, PAD	61.200.000	61.200.000	100,00	234,23	100,00	144,74
1.02.12.1.02.12.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU, PAD	96.237.398	89.498.692	93,00	100,00	100,00	97,67
1.02.12.1.02.12.02.01.003	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DAU, PAD	194.215.322	194.215.322	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	PAD	6.800.000	5.377.600	79,08	100,00	100,00	93,03
1.02.12.1.02.12.02.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	DBH PPH,DAU,PAD	141.056.000	140.886.300	99,88	100,00	100,00	99,96
1.02.12.1.02.12.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DBH,PPH,DAU,PAD,SiLPA	182.732.500	182.728.373	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DAU, PAD, SiLPA	232.213.200	203.551.260	87,66	100,00	100,00	95,89
1.02.12.1.02.12.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PAD, SiLPA	3.467.000	3.464.967	99,94	100,00	100,00	99,98
1.02.12.1.02.12.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	-	-	-	-	-	-
1.02.12.1.02.12.02.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	189.591.400	189.591.400	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PAD	4.900.000	4.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	PAD	21.481.825	21.481.825	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah	PAD	47.725.000	47.643.800	99,83	100,00	100,00	99,94
1.02.12.1.02.12.02.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	DBH,PPH,DAU,PAD,SiLPA	22.800.000	22.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		338.649.038	338.510.132	99,96	100,00	100,00	99,93
1.02.12.1.02.12.02.02.010	Pengadaan Mebeleur	PAD	19.999.800	19.998.000	99,99	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	PAD	172.700.000	172.691.070	99,99	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar nasional	PAD	9.999.200	9.999.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	DBH PPH,DAU,PAD	101.150.038	101.090.692	99,94	100,00	100,00	99,98
1.02.12.1.02.12.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	PAD, SiLPA	7.000.000	6.996.770	99,95	100,00	100,00	99,98
1.02.12.1.02.12.02.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	PAD, SiLPA	5.000.000	4.934.600	98,69	100,00	100,00	99,56

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	DBH PPH,DAU	22.800.000	22.800.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-		
1.02.12.1.02.12.02.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	BKK BADUNG,PAD	-	-	-	-	-	-
1.02.12.1.02.12.02.05.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-		-
1.02.12.1.02.12.02.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PAD	-	-	-	-	-	-
1.02.12.1.02.12.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan		33.334.700	31.861.290	95,58	100,00	100,00	96,46
1.02.12.1.02.12.02.06.001	Penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	DBH PPH,DAU,PAD	26.416.700	26.411.890	99,98	100,00	100,00	99,99
1.02.12.1.02.12.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	PAD	6.918.000	5.449.400	78,77	100,00	100,00	92,92
1.02.12.1.02.12.02.07.	Program perencanaan anggaran SKPD		65.284.000	65.283.010	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.07.001	Penyusunan anggaran SKPD	DBH PPH,DAU,PAD	65.284.000	65.283.010	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		184.500.000	184.500.000	100,00	106,67	106,67	104,44
1.02.12.1.02.12.02.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	DBH PPH,DAU,PAD	53.250.000	53.250.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	DBH PPH,DAU,PAD,SiLPA	52.800.000	52.800.000	100,00	120,00	120,00	113,33
1.02.12.1.02.12.02.15.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	DBH PPH,DAU,PAD,SiLPA	78.450.000	78.450.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.19.	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi		281.911.000	281.605.350	99,89	110,33	86,65	98,94
1.02.12.1.02.12.02.19.001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	DBH PPH,DAU,PAD	81.930.000	81.930.000	100,00	100,00	86,65	95,55
1.02.12.1.02.12.02.19.002	kajian kebijakan penanaman modal	DBH PPH,DAU,PAD	22.875.000	22.875.000	100,00	100,00	86,65	95,55
1.02.12.1.02.12.02.19.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DBH PPH,DAU,PAD,SiLPA	83.913.000	83.662.350	99,70	100,00	86,65	95,45
1.02.12.1.02.12.02.19.004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	DBH PPH,PAD	8.645.000	8.595.000	99,42	162,00	86,65	116,02
1.02.12.1.02.12.02.19.005	Penyusunan perencanaan penanaman modal	DBH PPH,DAU,PAD	61.248.000	61.248.000	100,00	100,00	86,65	95,55

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.19.007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	DBH PPH,PAD,SiLPA	23.300.000	23.295.000	99,98	100,00	86,65	95,54
1.02.12.1.02.12.02.20.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan		175.361.729	174.054.329	99,25	100,00	100,00	99,77
1.02.12.1.02.12.02.20.001	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	DBH PPH,DAU,PAD	55.650.000	55.650.000	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.12.1.02.12.02.20.002	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	DBH PPH,PAD,SiLPA	64.200.000	63.000.000	98,13	100,00	100,00	99,38
1.02.12.1.02.12.02.20.003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	DBH PPH,DAU,PAD	55.511.729	55.404.329	99,81	100,00	100,00	99,94
1.02.12.1.02.12.02.21.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A		365.001.000	363.096.666	99,48	98,10	100,11	99,27
1.02.12.1.02.12.02.21.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI	DBH PPH,PAD,SiLPA	246.623.500	244.820.368	99,27	80,40	100,11	93,26
1.02.12.1.02.12.02.21.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama	DBH PPH,DAU,PAD,SiLPA	118.377.500	118.276.298	99,91	115,80	100,11	105,28
1.02.12.1.02.12.02.22.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B		414.538.888	414.397.048	99,97	102,74	100,11	100,94
1.02.12.1.02.12.02.22.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	DBH PPH,PAD,SiLPA	218.118.458	218.030.138	99,96	100,67	100,11	100,25
1.02.12.1.02.12.02.22.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	DBH PPH,PAD,SiLPA	196.420.430	196.366.910	99,97	104,80	100,11	101,63
TOTAL			3.063.000.000	3.020.647.364	98,62	103,13	99,28	100,24

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

Lampiran 7. Data Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Tahun 2020

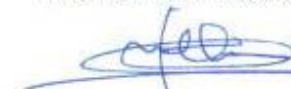
**REKAPITULASI JUMLAH IZIN TERBIT
TAHUN 2020**

NO	JENIS IZIN	DATA IZIN												KETERANGAN Total Perizinan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novemb er	Desember	
PERIZINAN														
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	42	224	68	127	138	87	94	99	460	178	250	103	1870
2	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
3	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)	0	0	0	0	0	0	1	0	14	5	4	3	0
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Radio	0	0	3	0	9	1	0	0	0	0	88	12	0
PERTANAHAN														
1	Izin Lokasi (IL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
2	Izin Membuka Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
PERHUBUNGAN														
1	Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
JUMLAH IZIN PELAYANAN A/I,II		42	224	71	127	147	88	95	99	474	183	342	118	1870
TOTAL JUMLAH IZIN PELAYANAN A/I,II		337			362			668			643			2
PELAYANAN A/III														
PENANAMAN MODAL														
1	Persetujuan Prinsip Membangun	11	16	5	8	6	10	3	15	7	12	17	21	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	8	0	3	7	3	5	7	0	2	2	5	3	45
2	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	-
3	Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a. Reklame	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b. Menara, gardu, atau bangunan lainnya	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c. Jaringan air bersih	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d. Jaringan listrik	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e. Jaringan telepon/seluler	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-	-
	f. Pemadam kebakaran	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	g. Penerangan Jalan Umum (JPU)	-	-	0	0								-	-
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman	-	-										-	-
3	Sertifikat Kepemilikan Banguna Gedung (SKBG)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
PERIKANAN														
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	4	16	0	0	3	6	11	5	4	7	14	6	76
PERDAGANGAN														
1	Izin Reklame	22	20	24	14	7	24	28	13	43	43	19	36	293
KETENAGAKERJAAN														
1	Validasi Dana Kompensasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)	1	1	0	0	4	4	1	3	5	4	5	-	-
JUMLAH IZIN PELAYANAN A/III		46	53	32	29	23	49	50	36	62	69	63	67	414

JENIS IZIN	DATA IZIN												KETERANGAN	
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novemb er	Desember	Total Perizinan	Total Non Perizinan
IZIN PELAYANAN A/I,II DAN A/III	88	277	103	156	170	137	145	135	536	252	405	185	579	
			131			101	-		148			199		
	PERIZINAN A I,A II					1870		Non Perizinan A I,A II					140	
	PERIZINAN A III					414		Non Perizinan A III					165	
	TOTAL PERIZINAN A I,II					2284		TOTAL Non Perizinan A III					305	
JUMLAH														
TOTAL SEMUA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PELAYANAN A													2589	

Singaraja, 30 Desember 2020

Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan A
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Ir. Ida Komang Sudita

Lampiran 8. Data Rekapitulasi Jumlah Izin Terbit Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Tahun 2020

REKAPITULASI JUMLAH IJIN YANG TERBIT															
NO	JENIS IJIN	2020												TOTAL	KETERANGAN
		DATA IJIN													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
PELAYANAN B L I H															
PENDIDIKAN															
1	Izin Oprasional Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK)	4		1	4	0	0	2	1	0	0	0	2	14	
2	Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD)	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	
3	Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin Operasional Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	1	0	1	0	2	2	3	0	0	1	1	2	13	
6	Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KOBER)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
7	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
8	Izin Operasional Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Izin Oprasional Pendirian Kelompok Belajar Kesetaraan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
SOSIAL															
1	Izin Pengumpulan Sumbangan	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
2	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	6	
3	Surat Tanda Daftar Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0		5
LINGKUNGAN HIDUP															
1	Izin Lingkungan	25	0	0	2	0	12	28	12	0	0	21	10	108	
2	Izin Pendaurlangan/Pengolahan Sampah (swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Izin Pengangkutan Sampah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin Pemrosesan Akhir Sampah (swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Usaha jasa	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
6	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Izin pembuangan Air Limbah cair Domestik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Izin pembuangan Air Limbah cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
PERHUBUNGAN															
1	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan	4	2	5	1	10	6	4	7	7	6	7	8	67	
2	izin Trayek	4	2	5	1	10	6	4	7	7	6	7	8	67	
3	Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	
4	Izin penyelenggaraan Tempat Parkir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH															
1	Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Izin Pembukaan Kantor Cabang pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin pembukaan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sertifikat penilaian Kesehatan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
PERTANIAN															
1	Izin Usaha Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Izin Usaha Tanaman pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Izin usaha Hortikultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	izin usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izin Usaha Obat hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Izin usaha Fasilitas Pemeliharaan hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Izin Usaha Rumah Sakit Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	izin usaha Pasar hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	izin usaha Pemotongan hewan - hewan dan penyediaan Daging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	izin penggilingan padi dn Penyosohan Beras	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
11	Izin Pengangkutan Kayu Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15	Pendaftaran usaha Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
PERDAGANGAN															

NO	JENIS IJIN	DATA IJIN												KETERANGAN	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL	Non Perijinan
1	Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)													496	
2	Izin Pengadaan dan pembelian daun tembakau Hijau dan Tembakau Krosok	53	67	33	30	24	31	48	45	23	59	46	37	496	
3	Izin Usaha Sarang Walet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin Perimbunan Bahan bakar Minyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Tanda daftar Gudang (TDG)	58	74	39	41	27	50	55	47	75	67	64	44	641	
10	Tanda Pendaftaran agen Atau Distributor Barang dan Jasa	1	1	3	2	1	0	6	4	1	1	2	1	23	
11	Surat tanda Pendaftaran Waralaba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INDUSTRI															
1	Izin usaha Industri (IUI)													0	
2	Izin perluasan Usaha Industri (IPII)	1	0	0	3	1	10	0	7	5	0	12	6	45	
3	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		148	147	92	92	86	121	151	130	119	140	165	118	841	669
PELAYANAN BIII															
KESEHATAN															
1	Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin Operasional Rumah sakit Swasta Tipe D	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	Izin Mendirikan RS Pratama Tipe D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Izin Operasional RS Pratama Tipe D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Izin Mendirikan Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Izin Apotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Izin Toko Obat	1	1	1	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
11	Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4	3	20	
12	Izin Optikal	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	9	
13	Izin usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
14	Izin Praktek Dokter Umum	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
15	Izin Praktek Dokter Spesialis	0	11	4	8	1	0	0	12	0	0	0	0	1	
16	Izin Praktek Dokter Gigi	8	8	11	7	5	0	7	2	5	2	7	6	71	
17	Izin Praktek Dokter Internshif	2	0	2	0	1	0	2	0	5	3	0	2	17	
18	Izin Praktek Bidan	0	0	15	0	0	0	4	0	0	2	0	2	38	
Jumlah		22	28	8	14	4	17	12	8	0	0	0	30	143	

NO	JENIS IJIN	DATA IJIN												KETERANGAN	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL	Non Perijinan
KEBUDAYAAN															
1	Izin Membawa Cagar Budaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEARSIPAN															
1	Izin penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARIWISATA															
1	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengelolaan Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengelolaan peninggalan Sejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengelolaan Mustium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pengelolaan Pemukiman dan atau Lingkungan Adat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengelolaan Obyek Sejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wisata Agro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Usaha kawasan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	usaha Angkutan Jalan Wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Usaha Biro Perjalanan Wisata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
12	Usaha Agen Perjalanan Wisata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Usaha Restoran	5	0	3	0	0	2	0	0	1	4	3	3	0	27
14	Usaha Rumah Makan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
15	Usaha Kafe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Usaha Bar/Rumah Minum	5	2	1	0	0	2	0	0	3	3	4	2	0	22
17	Usaha jasa Boga	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Usaha Pusat Penjualan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Usaha Hotel	3	2	2	2	0	5	2	0	3	5	6	5	0	33
20	Usaha Bumi Perkemahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Usaha Villa/ Cottage/ Bungalow/ Guest House	6	8	4	8	2	12	2	0	9	5	16	4	0	76
22	Usaha Pondok Wisata	0	1	2	0	4	1	1	0	2	5	5	2	0	23
23	Usaha Jasa Manajemen Hotel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Usaha Humas Wisata Senior/Lanjut Usia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Usaha Rumah Wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Usaha Motel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Usaha Lapangan Golf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Usaha rumah Bilyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Usaha Gelanggang Renang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Usaha Lapangan tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Usaha Gelanggang Bowling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Sanggar Seni	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
33	Galeri Seni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Gedung Pertunjukan Seni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Wisata Ekstrim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Arena Permainan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kelab Musik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Diskotik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Akomodasi Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Usaha Rumah Pijat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Usaha Taman Rekreasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Usaha Taman Berternak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Usaha Karaoke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Usaha jasa Impresariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif Konferensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Usaha jasa Pramuwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Usaha Wisata Arung Jeram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Usaha Wisata Davung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Usaha Wisata Selam	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
52	Usaha Wisata Memancing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Usaha Wisata Selancar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Usaha Wisata Olah Raga Tarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Usaha Dermaga Wisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Usaha Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57	Usaha Rumah Kos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PERDAGANGAN															
1	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB)	6	1	1	3	2	2	0	9	2		4	3	33	
2	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)	6	1	1	3	2	2	0	9	2	0	4	3	33	

Lampiran 9. Nilai Investasi Tahun 2020

REKAPITULASI DATA INVESTASI YANG ADA DI KABUPATEN BULELENG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020

NO	BULAN	SIUP	PPM (PMDN)	PPM (PMA)	TOTAL
1	JANUARI	8.397.328.069	115.800.000.000	47.676.000.000	171.873.328.069
2	FEBRUARI	9.974.958.551	24.103.388.400	36.000.000.000	70.078.346.951
3	MARET	14.673.713.126	1.769.133.151	80.000.000.000	96.442.846.277
4	APRIL	5.635.000.000	10.000.000.000	24.005.730.000	39.640.730.000
5	MEI	3.760.000.000	14.450.000.000	39.125.000.000	57.335.000.000
6	JUNI	6.822.500.000	6.250.000.000	23.001.000.000	36.073.500.000
7	JULI	23.879.000.000	119.549.501.644		143.428.501.644
8	AGUSTUS	6.702.000.000	180.970.050.000		187.672.050.000
9	SEPTEMBER	4.026.950.000	70.956.606.248		74.983.556.248
10	OKTOBER	14.325.000.000	28.242.025.579		42.567.025.579
11	NOVEMBER	7.359.000.000	18.546.992.780		25.905.992.780
12	DESEMBER	113.131.449.746	44.660.436.492		157.791.886.238
		218.686.899.492	635.298.134.294	249.807.730.000	1.103.792.763.786

Singaraja, 5 Januari 2021

Mengetahui,
Kabid Pengendalian, Pelaksanaan
Informasi Penanaman Modal

Kasi Sistem Informasi dan
Pembinaan Penanaman Modal



Putu Sandra Paramitha Dewi, S.T., M.A.P
NIP. 19850406 200902 2 001



Dewantoro, A. Md
NIP. 19650528 198603 1 013

REKAPITULASI KEMBANGAN RENCANA & REALISASI (PMA - PMDN) DI KABUPATEN BULELENG
 PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2020

KABUPATEN BULELENG
 1 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

BULAN	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)													PENANAMAN MODAL ASING (PMA)										
	TARGET			RENCANA				REALISASI						TARGET			RENCANA				REALISASI			
	JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA TKI TKA	JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)				
JANUARI	6	44.585.759.225	15	11	115.800.000.000	15	11	104.220.000.000	15	3	19.108.182.525	15	1	47.676.000.000	10	1	42.908.400.000							
FEBRUARI	6	80.254.366.605	10	14	24.103.388.400	14	4	20.487.880.140	14	3	34.394.728.545	10	1	36.000.000.000	6	1	30.600.000.000							
MARET	8	53.502.911.070	15	2	1.769.133.151	15	2	1.415.306.521	2	5	22.929.819.030	15	2	80.000.000.000	24	2	64.000.000.000							
TRW I	20	178.343.036.900	40	27	141.672.521.551	44	17	126.123.186.661	31	11	76.432.730.100	40	4	163.676.000.000	40	4	137.508.400.000							
APRIL	4	66.878.638.838	10	8	10.000.000.000	16	8	7.500.000.000	16	2	28.662.273.788	10	2	24.005.730.000	9	2	18.004.297.500							
MAY	6	120.381.549.908	10	5	14.450.000.000	10	5	10.115.000.000	10	3	51.592.092.818	10	2	39.125.000.000	43	2	27.387.500.000							
JUNI	8	80.254.366.605	12	3	6.250.000.000	6	3	4.062.500.000	6	3	34.394.728.545	12	2	23.001.000.000	16	2	14.950.650.000							
TRW II	18	267.514.555.350	32	16	30.700.000.000	32	16	21.677.500.000	32	8	114.649.095.150	32	6	86.131.730.000	68	6	60.342.447.500							
JULI	4	66.878.638.838	12	21	119.549.501.644	120	21	71.729.700.986	120	2	28.662.273.788	12												
AUGUSTUS	6	120.381.549.908	12	36	180.970.050.000	201	36	99.533.527.500	201	3	51.592.092.818	12												
SEPTEMBER	5	80.254.366.605	10	43	70.956.606.248	207	43	31.930.472.812	207	3	34.394.728.545	10												
TRW III	15	267.514.555.350	34	100	371.476.157.892	528	100	203.193.701.298	528	8	114.649.095.150	34												
OCTOBER	3	44.585.759.225	15	52	28.242.025.579	548	52	5.648.405.116	548	3	19.108.182.525	15												
NOVEMBER	8	80.254.366.605	20	35	18.546.992.780	172	35	2.782.048.917	172	3	34.394.728.545	20												
DESEMBER	5	53.502.911.070	20	53	44.660.436.492	360	53	4.466.043.649	360	2	22.929.819.030	20												
TRW IV	16	178.343.036.900	55	140	91.449.454.851	1.080	140	12.896.497.682	1.080	8	76.432.730.100	55												
TOTAL INV.	69	891.715.184.500	161	283	635.298.134.294	1.684	273	363.890.885.641	1.671	35	382.163.650.500	161	10	249.807.730.000	108	10	197.850.847.500							

Kurs = Rp.

Total N I (PMA & PMDN)

Total Rencana
 Total Realisasi

Total P (PMA & PMDN)

Total Rencana
 Total Realisasi

Rp. 885.105.864.294
 Rp. 561.741.733.141
 Rp. 293
 Rp. 283

gan :
 lai Investasi
 oyek
 ollar disesuaikan dengan APBN / APBD Tahun Berjalan

Mengetahui,
 Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan
 Informasi Penanaman Modal
 Putu Sandra Paramitha Dewi, S.T., M.A.P
 NIP. 19850406 200902 2 001

Singaraja, 5 Januari 2021
 Kasi Sistem Informasi dan
 Pembinaan Penanaman Modal
 Dewanto, A.Md.
 NIP. 19650528 198603 1 013

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN RENCANA & REALISASI (PMA - PMDN) DI PROVINSI BALI
MENURUT SEKTOR
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2020**

LOKASI : KABUPATEN BULELENG
PERIODE : 1 OKTOBER 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

NO	LOKASI	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)								PENANAMAN MODAL ASING (PMA)										
		RENCANA				REALISASI				RENCANA		REALISASI								
		JUMLAH PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (US \$)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	IZIN USAHA (US \$)					
3	4	TKI	TKA	5	6	7	8	TKI	TKA	9	10	11	12	TKI	TKA	13	14	15	16	
I	SEKTOR PRIMER																			
	1. Peternakan	1	600.000.000			7		1		342.000.000		7								
	2. Kehutanan																			
	3. Perikanan	10	38.396.800.000			107		10		21.886.176.000		107								
	4. Pertambangan																			
	5. Tanaman Pangan & Perkebunan	1	100.000.000			4		1		57.000.000		4								
	JUMLAH SEKTOR PRIMER	12	39.096.800.000			118		11		22.285.176.000		114								
II	SEKTOR SEKUNDER																			
	1. Industri Mineral Non Logam																			
	2. Industri Makanan																			
	3. Industri Tekstil	1	1.000.000.000			2		1		570.000.000		2								
	4. Industri Barang dr Kulit & Alas kaki																			
	5. Industri Kayu																			
	6. Industri Kertas & Percetakan																			
	7. Industri Karet & Plastik																			
	8. Industri Logam, Mesin & Elektronik																			
	9. Industri Kendaraan & Alat Transport																			
	10. Industri Kendaraan Bermotor																			
	11. Industri Lainnya	5	6.870.570.000			63		5		4.087.173.993		63								
	12. Industri Kimia & Farmasi	1	375.000.000			9		1		213.750.000		9								
	JUMLAH SEKTOR SEKUNDER	7	8.245.570.000			74		7		4.870.923.993		74								
III	SEKTOR TERSIER																			
	1. Jasa Lainnya	36	131.959.430.261			513		36		75.216.875.249		513								
	2. Listrik, Gas & Air																			
	3. Konstruksi	23	7.874.100.000			148		23		4.488.237.000		148								
	4. Perdagangan & Reparasi	139	137.897.695.980			633		139		78.901.686.709		633	2	36.125.000.000		12		2	36.051.691.400	
	5. Hotel & Restoran	36	253.757.748.702			110		36		145.641.916.760		110	8	213.682.730.000		96		8	161.799.156.100	
	6. Transportasi, Gudang & Komunikasi	22	16.863.400.951			49		22		9.612.138.542		49								
	7. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	17	39.603.388.400			26		17		22.873.931.388		26								
	JUMLAH SEKTOR TERSIER	273	587.955.764.294			1.479		273		336.734.785.648		1.479		10	249.807.730.000		108		10	197.850.847.500
	TOTAL INVESTASI	292	635.298.134.294			1.671		291		363.890.885.641		1.667		10	249.807.730.000		108		10	197.850.847.500

Ket : Kurs = Rp.

TOTAL PMDN & PMA
Rencana Investasi
Realisasi Investasi

Rp. 885.105.864.294
Rp. 561.741.733.141

561.741.733.141

Singaraja, 11 JANUARI 2021

Kasi Sistem Informasi dan
Pembinaan Penanaman Modal


Dewantoro, A.Md.

NIP. 19650528 198603 1 013

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal


Putu Sandra Paramitha Dewi, S.T., M.A.P.